



Peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Gurindam Dua Belas Kota Tanjungpinang

Raissa Syahrina Desmarianti^{1*}, Nazaki², Rizky Octa Outri Charin³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

**Penulis Korespondensi: raissa.syrn12@gmail.com*

Abstract. Tanjungpinang City has been the capital of Riau Islands Province since 2002 based on Law Number 5 of 2001 concerning the Establishment of Tanjungpinang City, which also became the basis for the establishment of Riau Islands Province in 2002 through Law Number 25 of 2002 concerning the Establishment of Riau Islands Province. Tanjungpinang City has a very strategic location for tourism, as evidenced by the large number of foreign tourists visiting the city. However, infrastructure in Tanjungpinang City at that time seemed to be stagnant, unable to be developed further due to the lack of efforts from the local government. Responding to this phenomenon, the Riau Islands Provincial Government, through the Office of Public Works, Spatial Planning and Land (DPUPP), has stepped in as the government agency responsible for sustainable infrastructure development in the construction and planning of the Gurindam Dua Belas Area. This development and planning will involve all relevant sectors, especially agencies/OPDs that will work together in an integrated manner, as well as the involvement of the community and the private sector as investors in this area. This study aims to describe and analyze the role of the Riau Islands Provincial Public Works, Spatial Planning and Land Agency in Infrastructure Development in the Provincial Capital. The research method used was qualitative research with data collection techniques in the form of literature studies, interviews, and observations.

Keywords: Gurindam 12 Area; Infrastructure Development; Public Works; Role; Spatial Planning and Land Agency.

Abstrak. Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang yang sekaligus menjadi dasar pembentuk Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang mempunyai wilayah yang sangat strategis untuk dijadikan area wisata, terbukti dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung di kota ini. Akan tetapi Infrastruktur di Kota Tanjungpinang saat itu seakan-akan jalan ditempat, tidak bisa dikembangkan lebih jauh karena belum adanya upaya dari pemerintah daerah. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPP) hadir sebagai instansi pemerintah yang berperan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam pembangunan dan penataan Kawasan Gurindam Dua Belas. Pembangunan dan penataan ini akan melibatkan seluruh sektor terkait terutama Dinas/OPD yang akan bekerja terintegrasi satu sama lain, serta keterlibatan masyarakat dan sektor Swasta sebagai investor di Kawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pembangunan Infrastruktur di Ibukota Provinsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa studi literatur, wawancara dan observasi.

Kata kunci: Kawasan Gurindam 12; Pekerjaan Umum; Penataan Ruang dan Pertanahan; Pengembangan Infrastruktur; Peran.

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU tersebut menjelaskan tentang Pembangunan Infrastruktur yang hingga saat ini masih menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hansastri dan Hamdani, 2024).

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. (Ferlita, 2024). Kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam, menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi semakin vital pada tingkat daerah. Dan pengetahuan lokal, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota bertanggung jawab untuk merumuskan rencana pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Dalam konteks ini yang bertanggung jawab atas pembangunan, perencanaan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sumber daya air (irigasi, air bersih), bangunan Gedung, serta pengelolaan tata ruang wilayah ialah Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (DPUPR) atau Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPP) di tingkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan Instansi Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam pembangunan infrastruktur strategis, pengelolaan sumber daya air, penataan ruang, hingga penanganan kebencanaan terkait infrastruktur.

Sebagai intasi pemerintah yang betugas dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai upaya di Kawasan Strategis Daerah (KSD) Provinsi dan Lintas Dearah Kabupaten/Kota dalam pencapaian yang optimal. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 konsistensi capaian Pemerintah provinsi kepulauan riau telah mencapai 100 persen, hal ini menunjukkan efektivitas koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/kota dalam pengelolaan ruang lintas wilayah, serta mengindikasikan adanya kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mendapatkan dukungan pengawasan, pengendalian yang memadai di lapangan.

Meskipun capaian telah maksimal, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama terkait dinamika pertumbuhan kawasan, tekanan alih fungsi lahan, serta perlunya menjaga kualitas lingkungan dan estetika kawasan. Oleh karena itu, keberlanjutan penataan memerlukan penguatan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, pembinaan teknis yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan pembangunan di Kawasan strategis secara real time dan terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaan upaya pemerintah provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kegiatan yang akan menjadi prioritas, salah satunya ialah Penataan Kawasan Gurindam 12 Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan kota yang memiliki peranan penting dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki pusat pertumbuhan yang penting sebagai IbuKota Provinsi, maka pembangunan fisik kota perlu ditingkatkan dengan harapan pengembangan kota Tanjungpinang yang seakan-akan jalan

ditempat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadikan Kawasan Gurindam Dua Belas sebagai Proyek Strategis sebagai pembangkit ekonomi baru sekaligus mengoptimalkan asset milik negara. Terdapat beberapa perencanaan pembangunan pada kawasan tersebut, salah satunya yaitu Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang. Di mana perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar ini sudah menjadi keinginan pemerintah Kepri sejak tahun 1990-an yang saat itu tengah dilanda krisis moneter, sehingga perencanaan pembangunan jalan lingkar tersebut hanya menjadi angan-angan semata dan baru bisa di realisasikan sejak tahun 2019 hingga 2025 dan tahun yang akan datang dalam proses Penataan Kawasan Gurindam Dua Belas (Cahaya, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini melihat bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang memainkan peran sentral dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanakan infrastruktur Kawasan Gurindam Dua Belas di Kota Tanjungpinang. Menurut Dwijowijoto dan Wrihatnoto dalam Meutha (2019), teori peran sebagai seperangkat harapan, norma, dan perilaku yang diharapkan dari individua atau instansi dalam organisasi untuk mencapai tujuan kolektif. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peranan yang bertanggung jawab pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur di provinsi kepulauan riau, terkhusu pembangunan infrastruktur Kawasan Gurindam Dua Belas Kota Tanjungpinang sebagai kajian pemeliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa peran pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Begitu pula. Hal ini karena, dalam konteks pemerintahan daerah yang otonom, seberapa besar peran pemerintah sebagai mediator dan fasilitator dalam segala bidang kehidupan akan sangat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu ciri peran pemerintah yang kuat adalah melihat seberapa besar fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Ini juga menunjukkan apakah pembangunan tersebut akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan memberikan derajat otonom yang tinggi tanpa gangguan dari kelompok kepentingan mana pun.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode penelitian kualitatif, menurut (Mappasere dan Suyuti, 2019) Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data

yang digunakan peniliti berupa studi literatur, wawancara, dan observasi. Adapun tujuan penggunaan metode ini dalam membuat dan menyusun penelitian tentang Peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur daerah tingkat provinsi disebabkan oleh pembangunan infrasatruktur yang belum merata. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat penuh mulai dari pemilihan topik hingga analisis dan interpretasi data. Proses pengumpulan data didukung oleh pedoman wawancara, hasil observasi lapangan dan studi dokumentasi. Data wawancara kemudian di analisis, Teknik pengumpulan data menjadi kunci untuk memperoleh informasi yang valid, karena tanpa penguasaan Teknik ini, data yang diperoleh tidak akan memenuhi standar penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau, terkhusus menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu Kawasan Gurindam Dua Belas di Kota Tanjungpinang. Kegiatan Penilitian ini berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak bulan September hingga Desember.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Laporan Pra Feasibility Study Tahun 2017, Penataan Kawasan Gurindam 12 ini bermula sejak tahun 2017 di era kepemimpinan Gubernur Nurdin Basirun, dengan rencana ruang lingkup; 1) Pengembangan Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang, di Pesisir Gurindam Dua Belas, 2) Pengembangan Pengaman Pantai untuk masyarakat pesisir di Kota Tanjungpinang, 3) Perbaikan kerusakan pesisir akibat abrasi, 4) Menambah prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH), 5) Menata Kawasan Pesisir sebagai pusat perdagangan jasa terpadu di Kota Tanjungpinang. Proyek ini dikerjakan lebih kurang 2 tahun 3 bulan yang dimulai pada tahun 2018 dan rampung di tahun 2020 menggunakan dana *Multiyears* dengan total anggaran sebesar Rp. 428 miliar, dengan harapan menjadi ikon sekaligus semangat baru dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau terkhusus Kota Tanjungpinang (Melayupedia.com, 2021)

Tahun 2018 mulai dilaksanakan pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Gurindam Dua Belas yang pada saat itu rencana awal pembangunan bermula dari Kawasan pintu masuk jembatan 1 pulau dompak menyusuri Kawasan tepi pantai sampai dengan Kawasan kota lama, dengan menggunakan cara reklamasi dari: a) Kawasan Marina, b) Kawasan Potong Lembu, c) Kawasan Pelantar IV, d) Kawasan Pelantar III, e) Kawasan Pelantar KUD, f) Kawasan Pelantar I-II, g) Kawasan Pelantar Penyengat, h) Kawasan Gedung Daerah, i) Kawasan Tanjung Buntung/Laman Bunda, j) Kawasan Tugu Pensil, k) Kawasan Teluk Keriting, l) Kawasan

Pantai Impian. Kawasan kota baru Gurindam Dua Belas ini dibagi menjadi beberapa segmen/Zona, yaitu: 1) Zona 1 seluas 27,27 ha (Kawasan a-g); 2) Zona 2 seluas 36,42 ha (Kawasan h-i), pada zona ini, dalam pembangunannya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu; a. Luas 11,16 ha, yang akan diserahkan ke pihak swasta, b. Sisanya seluas 25,26, proses reklamasinya akan dilakukan oleh pemerintah, namun dalam pembangunannya bisa melibatkan pihak swasta. Pada zona ini, akan dikembangkan Kawasan olah raga. 3) Zona 3 seluas 13,60 ha, (Kawasan Pantai Impian)

Kawasan ini merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Kota Tanjungpinang yang diperuntukan sebagai Kawasan kota baru. Kawasan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam masa-masa yang akan datang, terutama dalam pembangkitan ekonomi nasional, regional dan tentunya lokal Kota Tanjungpinang. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau juga berupaya memperluas wilayah darat/Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui beberapa proyek baru tanpa mengurangi yang sudah ada dan akan di dukung dengan sebuah kuasa besar didepannya. Dimana ada kegiatan pariwisata di tepi pantai yang mempunyai *landmark* Gedung Daerah, sehingga membuat Gedung Daaerah mempunyai sebuah alun-alun bagi masyarakat umum.

Namun, perencanaan pembangunan Kawasan kota baru Gurindam Dua Belas tidak terealisasi sempurna berdasarkan Laporan Pra Feasibility Study Tahun 2017, seperti Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Gurrindam Dua Belas yang rute nya dialihkan dari Jembatan 1 Dompak menjadi penambahan jalan di samping Markas Komando Lantamal IV (saat ini Komando Armada 1) yaitu Kawasan Teluk Keriting. Hal ini disebabkan oleh larangan dari pihak Mabes TNI untuk membangun jalan lingkar di depan Kawasan militer, karena menghalangi sistem pengawasan, pertahanan dan keamanan laut (Panama, 2018). Begitu juga perencanaan jalan yang menyusuri Kawasan pelantar-pelantar kota Tanjungpinang tidak terealisasikan karena menghalangi aktivitas kapal di Pelabuhan Sri Bintan Pura, sehingga jalan di alihkan disamping pintu masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura. Zona 1 dan 3 juga menjadi Kawasan perencanaan yang tidak terealisasikan pemerintah dalam proses pembangunannya.

Proyek yang direncanakan rampung pada tahun 2020 ini tidak berjalan mulus. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengalami berbagai kendala sejak tahap *Desain Engineering Detail (DED)* yang mengalami perubahan, Penyususan AMDAL, dan kondisi Indonesia yang saat itu tengah dilanda Covid-19. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau masih terus berupaya melakukan penataan Kawasan Gurindam Dua belas, dan mengfokuskan pembangunan pada Zona 2 di wilayah a dan b. Pada Kawasan tersebut di bangun Ruang

Terbuka Hijau (RTH) atau yang biasa di sebut sebagai Alun-alun Gurindam Dua Belas yang diresmikan pada tahun 2021 bersamaan dengan peresmian Jalan Lingkar Kawasan Pesisir Gurindam Dua Belas oleh Gubernur Kepri, Isdianto (Redaksi Vnews, 2021).

Walaupun pembangunan dan penataan Kawasan Gurindam Dua Belas belum di katakan rampung 100 persen karena masih banyak lahan kosong, akan tetapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terus berupaya mengoptimalkan Kawasan tersebut. Sejumlah perencanaan fasilitas sudah mulai terealisasikan, mulai dari Gedung Dekranasda, Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM), Toilet umum, hingga penataan *area jogging track* sepanjang 300 meter di sisi darat. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah menjalankan perannya dengan optimal dalam Penataan Kawasan Gurindam Dua Belas. Mereka beromitmen untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dan dapat menunjang pariwisata Kepulauan Riau.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan bermanfaat dalam membuat negara menjadi lebih tertata pembangunannya dan pertumbuhan ekonominya. Negara yang lebih tertata di berbagai aspek dapat membuat masyarakat merasakan berbagai fasilitas umum dan fasilitas publik yang lebih nyaman. Tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, sebagai Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat, Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan juga terus mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan dalam pengembangan pembangunan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur yang andal, tertata, dan berkelanjutan, serta menjamin tertib tata ruang dan kepastian hukum atas tanah. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pengembangan Kawasan Gurindam Dua Belas ini merupakan langkah maju menuju pembangunan ekonomi daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk penggunaan aset pemerintah daerah. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Barang Milik Daerah adalah skema yang dipilih, seperti Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang mengubah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Menurut Pasal 169 Permendagri, Pemerintah Daerah dapat menerapkan KSP untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna barang milik daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan Kawasan Gurindam Dua Belas ini akan dilaksanakan bertahap dalam jangka waktu 10 tahun, hal ini disebabkan oleh lokasi proyek di pantai tempat aktivitas masyarakat sekitar dan secara kehidupan akan menyatu dengan kehidupan laut.

Sebagai saran, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau harus bisa mengelola perencanaan dan proses pembangunan Kawasan Gurindam Dua Belas secara optimal dan bermantab sesuai dengan visi misi Provinsi Kepulauan Riau, sehingga akan menghasilkan kawasan yang bisa berdaya saing secara dan global dan mendapatkan hasil yang positif dari masyarakat yang terdampak pembangunan ini. Keterlibatan masyarakat sangat berperan andil dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dapat menghadirkan pelaku usaha dan investor dalam hal penyediaan dana pembangunan yang menjadi bagian penting untuk penciptaan dan penataan Kawasan Gurindam Dua Belas. Hadirnya pihak swasta juga dapat mendukung pembangunan yang modern pada Kawasan Gurindam Dua Belas yang pembangunnya tetap diawasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan ini diharapkan menjadi kawasan pembangkit ekonomi di Kota Tanjungpinang.

DAFTAR REFERENSI

- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., Harsono, I., & Kunci, K. (2023). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016–2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–12.
- Antara News Kepri. (2018, November 26). Tahun depan, proyek Gurindam 12 dapat alokasi Rp191 miliar. <https://kepri.antaranews.com/berita/51118/tahun-depan-proyek-gurindam-12-dapat-alokasi-rp191-miliar>
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. (2025). *Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2029*.
- Ferlita, S., Saepudin, E. A., Maharani, P. S., Kurniawan, I. P., Susilawati, S., & Al Fauzan, R. Z. (2024). Analisis pembangunan nasional pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 189–195.

Genpi.co. (2019). Proyek jalan lingkar Tanjungpinang terus dikebut. <https://www.genpi.co/bisnis/15287/proyek-jalan-lingkar-tanjungpinang-terus-dikebut>

Hansastri, H., & Hamdani, H. (2024). Sinkronisasi dan sinergitas proyek infrastruktur prioritas dan proyek strategis nasional dengan perencanaan nasional dan daerah. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(2).

Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33, 1–10.

Melayupedia.com. (2021). Proyek Jalan Lingkar Gurindam 12 di Kepri berpotensi mangkrak? <https://www.melayupedia.com/berita/21/proyek-jalan-lingkar-gurindam-12-di-kepri-berpotensi-mangkrak>

Meutha, A. (2019). *Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba* (Skripsi). 111 hlm.

Mutiara, W., & Hakim, A. R. (2025). Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 453–458.

Nusantara, B. (2017). *Masterplan, desain dan AMDAL kawasan Pantai Gurindam Dua Belas (kawasan pesisir) Kota Tanjungpinang: Laporan pra-feasibility study*. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Panama, N. (2018). Desain jalan lingkar Gurindam 12 belum selesai. *ANTARA News Kepri*. <https://kepri.antaranews.com/berita/47155/desain-jalan-lingkar-gurindam-12-belum-selesai>

Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2025). Pemprov Kepri buka tender pemanfaatan kawasan Gurindam 12 untuk dorong ekonomi Tanjungpinang. <https://www.kepriprov.go.id/pengumuman/pemprov-kepri-buka-tender-pemanfaatan-kawasan-gurindam-12-untuk-dorong-ekonomi-tanjungpinang>

PT Asterix Anugrah. (2023). *Laporan pendahuluan pengawasan teknis (lanjutan) pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang (Gurindam 12)-1 paket*.

Suarasiber.com. (2019). Selesai 23 persen, proyek Gurindam 12 ubah wajah Tanjungpinang. <https://suarasiber.com/2019/07/selesai-23-persen-proyek-gurindam-12-ubah-wajah-tanjungpinang/>

Vnews.click. (2025). Jalan lingkar Gurindam 12 resmi dibuka. <https://www.vnews.click/jalan-lingkar-gurindam-12-resmi-dibuka/>